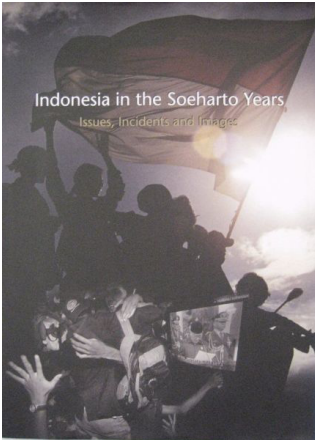


McGlynn, John H. et al. (red.), *Indonesia in the Soeharto years; Issues, incidents and images*. Jakarta: Lontar Foundation, 2007, xxiii + 483 hlm. ISBN 979-808357-1. Price: EUR 49,90 (hard cover).



**Susanto Zuhdi**

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia  
susanto\_zuhdi@yahoo.com

Berisi lebih 50 esai pendek, 80 foto disertai keterangan, dan 500 foto bersejarah, buku ini sesungguhnya merupakan dokumen untuk pembaca yang berminat pada politik dan kebudayaan modern Indonesia. Buku ini merupakan terbitan monumental yang belum pernah dilakukan mengenai sejarah kontemporer Indonesia, yang disajikan dengan beragam jenis foto secara

komprehensif: yaitu masa pemerintahan Soeharto, yang dimulai dari peristiwa 1965 dan 1966 hingga pemilihan presiden secara langsung pada 2004.

Buku ini mulai disusun pada tahun 1997, ketika pemerintah Indonesia bergulat mengatasi krisis ekonomi Asia. Suatu hal yang masih tersamar seputar sikap politik Presiden Soeharto ketika itu, sebenarnya dapat dijelaskan bahwa ia tidak hanya gagal mengatasi peristiwa itu, ia juga mengira bahwa suatu saat krisis itu akan berlalu dan ia mengharap kekuasaan masih dalam genggamannya. Namun, tampaknya tidak ada kemauan Presiden Soeharto memerintahkan para menternya untuk mendapatkan strategi alternatif untuk melanjutkan pembangunan ekonomi dan sosial. Soeharto juga tidak mempersiapkan bangsa dalam proses pengalihan kekuasaan secara bertanggung jawab dari birokrasi militeristik ke cara demokratik, yaitu suatu sistem yang cocok untuk sebuah negeri dengan masyarakat multi etnik dan aspirasi.

McGlynn memperkirakan Soeharto akan memperlihatkan (kembali) keterampilan yang mengagumkan untuk masa kepresidenannya berikut. Lima tahun, menurutnya merupakan waktu yang cukup untuk menyiapkan penerbitan sebuah sejarah Indonesia dalam masa sepanjang pemerintahan Presiden Soeharto. Ternyata sejarah menggambarkan lain. Krisis moneter di Asia yang mendera Asia Juli 1997 menjadi faktor awal yang menyebabkan jatuhnya Soeharto. Pada bulan Mei 1998, di tengah krisis Soeharto mengundurkan diri. Sejak itu muncul masalah transformasi Indonesia dari negara semi-militeristik menjadi bangsa yang demokratis.

Dalam hampir seluruh masa 32 tahun Soeharto menjadi presiden, Indonesia tampak menjadi uji coba yang berhasil pada negara dunia ketiga yang sedang membangun, dari kasta paria menjadi contoh sukses dalam perencanaan ekonomi dan demokrasi modern. Dalam masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

sebagai negara yang berhasil dalam program keluarga berencana.

Perencanaan pembangunan nasional besar-besaran juga mendapatkan pujian dari Bank Dunia (*World Bank*) dan keuangan internasional. Akan tetapi suatu kenyataan yang sering ditutupi di balik keberhasilan Orde Baru adalah berbelit-belitnya jaringan nepotisme, korupsi, dan berlangsungnya secara luas penindasan terhadap kebebasan warga sipil, lingkup yang ditutupi secara penuh itu kini mulai tampak jelas. Indonesia di bawah Soeharto memperlihatkan berbagai isu dan insiden yang mempengaruhi pembentukan bangsa.

Fenomena itu menjadi pola dan kerangka penyusunan buku ini. Setelah melalui diskusi panjang, para editor kemudian menetapkan delapan tema: "Politik takut", "Militer dan militerisme", "Informasi dan indoktrinasi", "Kesukuan, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA)", "Pembangunan", "Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme", "Konstitusionalitas dan Legitimasi", dan "Pemberontakan dan Perlawanan".

Kedelapan tema itu merupakan kerangka deskriptif bagi paparan sejarah secara kronologis yang dirancang ke dalam sembilan episode. Sebelum paparan itu, buku kini didahului oleh *Foreword*, *Preface*, dan *Introduction*, berturut-turut oleh mantan presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, Goenawan Mohamad, dan Taufik Abdullah. Dilihat dari "Kata Pengantar" dan "Pendahuluan" itu saja sudah suatu keistimewaan, belum lagi dengan epilog oleh Ignas Kleden. McGlynn sebagai pimpinan editor memberi "Acknowledgements" di bagian akhir.

Jimmy Carter mengawali dengan meninjau epilog Orde Baru, yakni suatu pujian bahwa pada akhirnya Indonesia dapat menjadi negara demokratis, bahkan paling demokratis bersama Jepang. Pernyataan Carter yang penting dan menarik sebagai catatan historis, adalah ketika ia mendesak Soeharto agar menerapkan HAM di Indonesia. Suatu tindakan pemerintah Orde Baru yang segera terlihat adalah berupa membebaskan tahanan politik di Indonesia.

Goenawan Mohamad membuka pengantarnya dengan mengajukan adagium bahwa sebuah buku mengenai masa lampau adalah ingatan yang dirancang sedemikian rupa. Merekonstruksi suatu plot sejarah memerlukan tindakan memangkas dan memotong terhadap unsur yang yang tidak dapat distrukturkan. Artinya, buku tentang masa lampau tidak pernah dapat mengingat semuanya. Begitu pula dengan buku ini, sebuah upaya menciptakan album sejarah Indonesia 1966-1998.

Buku ini dikemas dengan perspektif berbeda dari jenis konvensional, yaitu untuk melihat sejarah sebuah rezim dengan historiografinya. Kalau album yang konvensional merupakan narasi besar (*grand-narrative*) maka album ini memberikan narasi kecil. Album corak pertama disebut epik karena lebih menempatkan "orang besar" dalam sejarah, sedangkan yang kedua episodik. Buku ini sangat berbeda dari album seperti *30 Tahun Indonesia Merdeka* yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI tahun 1980.

Paparan Taufik Abdullah dalam Pendahuluan berusaha memolakan sejarah periode Orde Baru. Orde Baru, adalah istilah untuk membedakan dari masa sebelumnya, Orde Lama, yang diberikan oleh Pjs. Soeharto, menurut

Taufik Abdullah sama karakternya. Bahkan dikatakannya lagi, Orde Baru sesungguhnya melanjutkan cara dan kebiasaan Orde Lama. Modifikasi memang dilakukan, misalnya kata "revolusi" menjadi tabu pada masa Orde Baru dan diganti dengan "Pembangunan"; sedangkan "kepribadian bangsa" ditukar dengan "jati diri bangsa". Bahkan sikap otoriter Soekarno pun melekat pula pada Soeharto. Pada masa keduanya berkuasa, semua kekuatan politik dan golongan dalam masyarakat-bangsa bergantung pada kedua pemimpin itu dan tragisnya, mengakibatkan malapetaka bagi demokrasi Indonesia.

Paparan pertama mencakupi periode 1965-1967 dengan topik "A change of rules". Didahului pengantar ketika pada tahun 1963, MPR mengumumkan Presiden Soekarno sebagai "Presiden seumur hidup". Semua kekuatan politik bergantung pada Presiden Soekarno. Inflasi tak terkendali. Tentara semakin kuat, menggantikan peran partai politik. Hanya Partai Komunis Indonesia (PKI), satu-satunya partai yang masih hidup dan menyatakan memiliki lima juta anggota, terbesar di dunia setelah Uni Soviet. Suasana konflik berakhir dengan peristiwa tragis, Gerakan 30 September 1965 yang menjadi faktor pemicu peralihan kekuasaan. Jenderal Soeharto diberi Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966, yang dikenal sebagai Supersemar oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi keadaan. Esai pendek pertama di bagian ini diawali oleh Hermawan Sulistiyo. Ia mengemukakan beberapa teori siapa pelaku atau dalang G30S.

Bagian kedua, periode 1968-1972 bertopik "Back in the fold". Dalam bagian ini diketengahkan Soeharto adalah "bintang yang menanjak". Dengan Supersemar Soeharto berperanan tampil kemuka mengambil kendali pada masa politik yang kacau dan membubarkan PKI. Sesudah pada tahun 1967 ia diangkat sebagai Pejabat Presiden maka pada tahun berikutnya ditetapkan oleh MPR sebagai Presiden. Soeharto menunda pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1968. Setelah Soeharto mengganti sejumlah anggota di MPR dan sudah tidak ada lagi penentangannya, pemerintah melaksanakan Pemilu pada tahun 1971. Pemerintah Orde Baru segera berupaya melakukan perbaikan ekonomi dan menurunkan laju inflasi.

"Order in the house" (1973-1977), bagian ketiga, menggambarkan mulai mengakarnya pemerintah Orde Baru. Strategi Orde Baru adalah kuasai hati rakyat untuk memelihara kekuasaan, dengan memenuhi kebutuhan dasar rakyat: pangan, sandang, dan papan. Badan Urusan Logistik (Bulog) berfungsi menyediakan kebutuhan pangan. Dalam bidang kesehatan, pemerintah mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat di setiap kecamatan, dan berhasil dalam program Keluarga Berencana. Investasi asing dengan dominasi Jepang menjadi faktor peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) tahun 1974.

Bagian keempat, periode 1978-1982 ("Differing opinions") memperlihatkan munculnya pendapat dan kritik yang tidak setuju atas dominasi Orde Baru yang semakin menindas kebebasan politik. Ini merupakan dekade kedua pemerintah Soeharto, dengan Pembangunan Lima Tahun III yang menekankan bidang pertanian untuk mendukung industri. Menghadapi oposisi dan apa yang oleh Presiden Soeharto disebut kaum yang "mbaleo"

(*dicidents*), pemerintah melakukan pengekan terhadap aktivitas politik, baik di kampus dengan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan untuk menekan para anggota Petisi 50.

Bagian Kelima "In the name of development" (1983-1987) digambarkan bahwa Presiden Soeharto berhasil dalam memimpin bangsa dan, oleh karena itu ia diberi gelar Bapak Pembangunan. Namun demikian, kritik terus bermunculan: untuk siapa manfaat pembangunan yang didanai oleh Bank Dunia itu. Fakta ironis Orde Baru adalah pembangunan di satu sisi disertai oleh tindakan penggusuran kampung, desa, kasus Kedung Ombo, dan pembersihan becak. Penembakan Misterius (Petrus) mulanya diterima masyarakat tetapi akibatnya justru banyak muncul tindakan premanisme membuat rakyat takut, tidak ada jaminan atas eksekusi tanpa peradilan.

Semboyan pembangunan dari dan untuk rakyat dipertanyakan. Sebagai contoh, foto yang menarik tapi ironis adalah ketika untuk menggambarkan simbol pembangunan dan keadaan sesungguhnya sebagian kondisi masyarakat (Jakarta) adalah foto sebuah pesawat terbang Jet (yang baru lepas landas) di atas sebuah kampung kumuh di Jakarta "symbols of development and poverty: a jet and a Jakarta slum" (hlm. 192-193).

Bagian Keenam, "The question of succession" (1988-1992). Periode ini berarti sudah duapuluh tahun Soeharto berkuasa. Orde Baru sepertinya sudah tanpa oposisi. Cara Orde Baru menyingkirkan kaum oposisi adalah dengan menggeser mereka dari jabatannya, contoh Jenderal M. Yusuf dari Panglima TNI/ABRI menjadi ketua BPK. Kritik dan protes terhadap Orde Baru juga dilakukan oleh para seniman. Pada tahun 1975, misalnya, F.X. Harsono dkk. membentuk New Art Movement. Menurut Harsono "kami sadar kalau berhadapan langsung terhadap pemerintah, tidak berumur panjang. Tetapi untungnya pemerintah bodoh karena tidak mengerti *visual idiom*" (hlm. 236).

Bagian ketujuh, "Rising opposition" (1993-1997). Dalam masa Orde Baru, sesungguhnya oposisi merupakan suatu ilusi. Bukankah hanya ada dua parpol dan satu Golkar yang "diizinkan berdiri". Suatu perkembangan baru di bidang politik muncul juga. Megawati Soekarnoputri memenangkan pemilihan Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pada tahun 1993 di Surabaya, meskipun tidak mendapat restu pemerintah. Naiknya popularitas Megawati dianggap menjadi ancaman bagi Soeharto.

Dalam bagian kedelapan "Up in smoke" (1997-1998), muncullah tuntutan untuk perubahan kepemimpinan nasional. Perkembangan itu terutama setelah terjadi penyerangan markas pusat PDI di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. Setelah itu protes dan demonstrasi terhadap Soeharto dan Orde Baru bertambah besar dan berdampak luas. Tiga bulan setelah Pemilu (1997) datang Krisis Moneter. Indonesia dipaksa menerima bantuan IMF. Demonstrasi mahasiswa di kampus muncul di kota-kota besar. Kerusuhan sosial muncul di Jakarta, Surakarta, dan Medan, disertai pembakaran toko, pusat perdagangan, sampai pemerkosaan dengan sasaran orang Cina. Peristiwa Mei 1997, seperti mengulang peristiwa Malari 1974. Siapa provokatornya? Seperti pada banyak peristiwa kerusuhan di

Indonesia, seperti biasa identitas yang bertanggungjawab masih terus dicari.

Bagian akhir buku ini adalah mengenai seputar dan setelah peristiwa jatuhnya Presiden Soeharto: "After the fall", Mei 1998-September 2004. Akhir era Orde Baru masih segar dalam ingatan. Presiden Soeharto turun dari jabatannya dengan istilah "lengser keprabon". Masa transisi politik terus berjalan. B.J. Habibie, yang kemudian diangkat sebagai Presiden Ketiga Republik Indonesia, dianggap dekat dengan Soeharto. Suatu hal yang penting dicatat, meskipun masa singkat pemerintahan ini diwarnai berbagai gejala dan konflik berdarah, tetapi Habibie berhasil mendorong pelaksanaan pengurangan kekuasaan pusat dengan memberikan kewenangan ke daerah: otonomi daerah.

Suatu fakta politik yang juga menarik adalah bahwa partai pemenang Pemilu tidak berarti menjadikan ketuanya sebagai Presiden. Begitulah, Presiden terpilih adalah Abdurrahman Wahid (Partai Kebangkitan Bangsa) sedangkan Megawati Soekarnoputri hanya menjadi wakilnya. Kasus Bulogate menjadi salah satu faktor bagi jatuhnya Presiden Abdurrahman. Megawati kemudian presiden. Suatu prestasi yang patut dicatat dalam era pemerintahan Megawati adalah keberhasilan pemilihan anggota legislatif dan presiden secara langsung tanpa eksekusi yang berarti.

Dalam epilog, Ignas Kleden merefleksikan mengapa Orde Baru dapat bertahan dalam tiga dekade. Keberhasilan Orde Baru didukung oleh penerapan politik takut melalui konstruksi: sosial, politik, dan pendidikan.

Apa yang dapat dipetik dari buku ini seperti dikatakan Goenawan Mohamad adalah sebuah *aide-memoire*, suatu catatan peringatan. Dalam kaitan ini, hal yang patut disimak, sebagaimana Taufik Abdullah mengutip Voltaire adalah bahwa "hanya satu pelajaran orang belajar dari sejarah, yakni mereka tidak belajar dari sejarah".

---